



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan November 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 40 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah sejumlah	Rp. 2.161.570.000.000,00
(2) Belanja Daerah sejumlah	<u>Rp. 2.362.011.433.100,00</u>
Defisit	Rp. (200.441.433.100,00)

(3) Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan sejumlah	Rp. 202.941.433.100,00
b. Pengeluaran sejumlah	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
 Pembiayaan Netto	<u>Rp. 200.441.433.100,00</u>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 824.774.150.700,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 1.008.035.484.627,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah sejumlah | Rp. 328.760.364.673,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 625.204.150.700,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 102.857.000.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 3.723.000.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sejumlah | Rp. 92.990.000.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah | Rp. 390.784.704.627,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 529.988.410.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 87.262.370.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. 2.000.000.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. 190.607.287.066,00 |
| c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 32.512.808.607,00 |
| d. Dana Tambahan Penghasilan
Guru PNS-D sejumlah | Rp. 1.989.000.000,00 |
| e. Dana Tunjangan Profesi
Guru PNS-D sejumlah | Rp. 78.902.882.000,00 |
| f. Dana Insentif Daerah sejumlah | Rp. 22.748.387.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 761.516.889.544,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 1.600.494.543.556,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 714.890.155.699,00 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 35.642.439.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 5.267.840.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 1.716.454.845,00 |
| e. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 4.000.000.000,00 |

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 382.141.587.614,08 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 581.588.333.465,82 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 636.764.622.476,10 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 202.941.433.100,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 2.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 196.941.433.100,00 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. 6.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sejumlah | Rp. 2.500.000.000,00 |
|---|----------------------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN RIAU :
(63 / 2014)

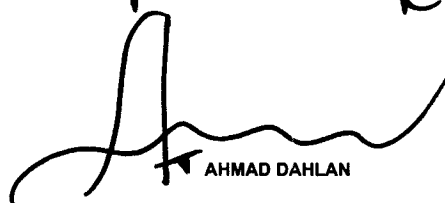
PEMERINTAH KOTA BATAM
RINGKASAN APBD
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	824,774,150,700.00
4. 1. 01.	Hasil Pajak Daerah	625,204,150,700.00
4. 1. 02.	Hasil Retribusi Daerah	102,857,000,000.00
4. 1. 03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,723,000,000.00
4. 1. 04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92,990,000,000.00
4. 2.	Dana Perimbangan	1,008,035,484,627.00
4. 2. 01.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	390,784,704,627.00
4. 2. 02.	Dana Alokasi Umum	529,988,410,000.00
4. 2. 03.	Dana Alokasi Khusus	87,262,370,000.00
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	328,760,364,673.00
4. 3. 01.	Pendapatan Hibah	2,000,000,000.00
4. 3. 03.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	190,607,287,066.00
4. 3. 04.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	32,512,808,607.00
4. 3. 06.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,989,000,000.00
4. 3. 07.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	78,902,882,000.00
4. 3. 08.	Dana Insentif Daerah (DID)	22,748,387,000.00
	Jumlah Pendapatan	2,161,570,000,000.00
5.	BELANJA	
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	761,516,889,544.00
5. 1. 01.	Belanja Pegawai	714,890,155,699.00
5. 1. 04.	Belanja Hibah	35,642,439,000.00
5. 1. 05.	Belanja Bantuan Sosial	5,267,840,000.00
5. 1. 07.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	1,716,454,845.00
5. 1. 08.	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000.00
5. 2.	Belanja Langsung	1,600,494,543,556.00
5. 2. 01.	Belanja Pegawai	382,141,587,614.08
5. 2. 02.	Belanja Barang dan Jasa	581,588,333,465.82
5. 2. 03.	Belanja Modal	636,764,622,476.10
	Jumlah Belanja	2,362,011,433,100.00
	Surplus / (defisit)	(200,441,433,100.00)
6.	PEMBIAYAAN	
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	202,941,433,100.00
6. 1. 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	196,941,433,100.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
6. 1. 05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	6,000,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	202,941,433,100.00
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,500,000,000.00
6. 2. 04.	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	2,500,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,500,000,000.00
	Pembiayaan netto	200,441,433,100.00
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0.00

Batam, 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM

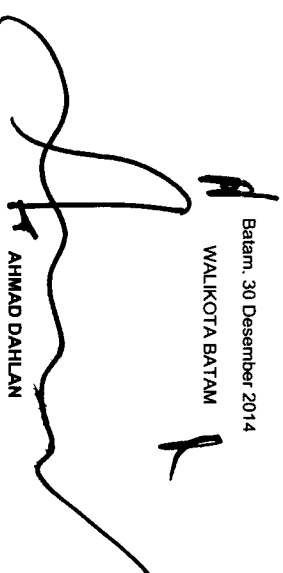


AHMAD DAHLAN

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembayaan NETTO	
1. 20. 03.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	202,941,433,100.00	2,500,000,000.00	200,441,433,100.00	

Batam, 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM

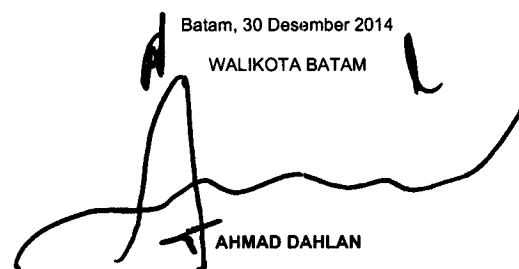


AHMAD DAHLAN

Kode Rekening							Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
1							2	3	4
2. 07.	2. 07. 14.	002.	001.	5.	2.	02.	Belanja Barang dan Jasa	157,840,000.00	
2. 07.	2. 07. 14.	002.	001.	5.	2.	03.	Belanja Modal	805,210,000.00	
2. 07.	2. 07. 14.	003.					Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	193,005,000.00	
2. 07.	2. 07. 14.	003.	001.				Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur	193,005,000.00	
2. 07.	2. 07. 14.	003.	001.	5.	2.	01.	Belanja Pegawai	8,750,000.00	
2. 07.	2. 07. 14.	003.	001.	5.	2.	02.	Belanja Barang dan Jasa	184,255,000.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.					Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Industri	2,689,695,510.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	006.				Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut	247,533,340.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	006.	5.	2.	01.	Belanja Pegawai	14,750,000.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	006.	5.	2.	02.	Belanja Barang dan Jasa	232,783,340.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	010.				Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam (DEKRANASDA)	1,171,692,340.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	010.	5.	2.	01.	Belanja Pegawai	275,388,840.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	010.	5.	2.	02.	Belanja Barang dan Jasa	896,303,500.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	014.				Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perdagangan Kota Batam	247,125,400.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	014.	5.	2.	01.	Belanja Pegawai	31,600,000.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	014.	5.	2.	02.	Belanja Barang dan Jasa	215,525,400.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	015.				Pembinaan Serta Pengembangan Industri Kecil Makanan dan Kerajinan di Kota Batam	685,279,230.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	015.	5.	2.	01.	Belanja Pegawai	148,931,860.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	015.	5.	2.	02.	Belanja Barang dan Jasa	536,347,370.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	016.				Pengawasan Barang Yang di Atur dan Diawasi Tata Laksana Perdagangan	338,065,200.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	016.	5.	2.	01.	Belanja Pegawai	88,746,440.00	
2. 07.	2. 07. 14.	015.	016.	5.	2.	02.	Belanja Barang dan Jasa	249,318,760.00	
							Jumlah Belanja	10,456,084,708.76	
							Surplus Defisit	(10,156,084,708.76)	

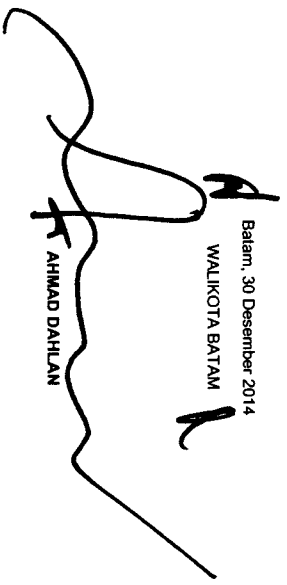
Batam, 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM

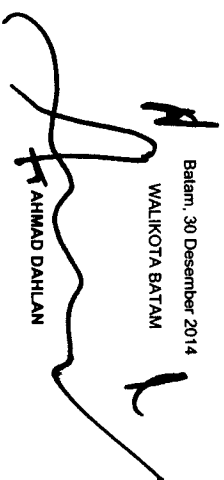


AHMAD DAHLAN

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja				Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6	
	JUMLAH	729,168,460,00	3,058,511,870,00	805,210,000,00	4,592,890,330,00	
	TOTAL JUMLAH	382,141,587,614,08	581,588,333,465,82	636,764,622,476,10	1,600,494,543,556,00	

Batam, 30 Desember 2014
WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
TOTAL JUMLAH		714.890.155.699,00	46.626.733.845,00	382.141.587.614,00	581.588.333.465,82	636.764.622.476,10	2.362.011.433.100,00


 Batam, 30 Desember 2014
 WALIKOTA BATAM
 AHMAD DAHLAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

GOLONGAN	ESELON					Non Eselon		TOTAL
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	2	0	3
Golongan IV/c	0	20	0	0	0	7	1	28
Golongan IV/b	0	14	73	0	0	14	3	104
Golongan IV/a	0	0	64	24	0	667	9	764
JUMLAH GOLONGAN IV	0	35	137	24		690	13	899
Golongan III/d	0	0	31	353	0	262	28	674
Golongan III/c	0	0	5	190	0	404	55	654
Golongan III/b	0	0	0	156	0	559	203	918
Golongan III/a	0	0	0	56	0	552	414	1022
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	36	755	0	1777	700	3268
Golongan II/d	0	0	0	0	0	185	99	284
Golongan II/c	0	0	0	0	0	278	189	467
Golongan II/b	0	0	0	0	0	71	512	583
Golongan II/a	0	0	0	0	0	4	247	251
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	538	1047	1585
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	16	16
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	23	23
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	16	16
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	14	14
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	69	69
TOTAL	0	35	173	779	0	3005	1829	5821

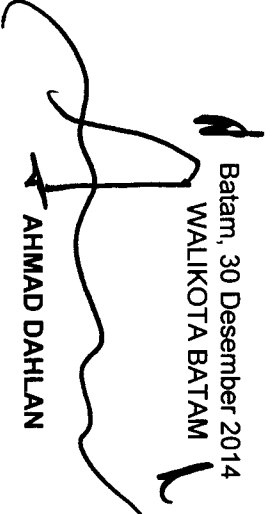
Batam, 30 Desember 2014
 WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

**PEMERINTAH KOTA BATAM
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN VII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 7 Tahun 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN HUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1.	Piutang Pajak	2013	362,655,059.00	192,255,838,120.00	309,678,000.00	192,308,815,179.00
2	Piutang Retribusi	2013	1,240,202,500.00	2,275,928,378.00	476,037,000.00	3,040,093,878.00
3	Piutang Lainnya	2013	40,880,679,572.24	120,230,188,829.69	35,321,439,974.51	125,789,428,427.42
J U M L A H			42,483,537,131.24	314,761,955,327.69	36,107,154,974.51	321,138,337,484.42

Batam, 30 Desember 2014

 WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN VIII RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : 7 Tahun 2014

TANGGAL : 30 Desember 2014

PEMERINTAH KOTA BATAM
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13
NO PENYERTAAN MODAL	TAHUN	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI AWAL TAHUN 2013	PENYERTAAN MODAL TAHUN 2014	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2014	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2001	PT. BANK RIAU		SAHAM		7.059.600.000,00	42.940.400.000,00	50.000.000.000,00				
2	2004	PT. PEMBANGUNAN KOTA BATAM		SAHAM		1.828.619.757,01		1.828.619.757,01				
3	2005	PT. RIAU AIR LINES		SAHAM		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00				
4	2013	PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA		SAHAM		2.048.769.265,06		2.048.769.265,06				
JUMLAH						12.936.989.022,07		55.877.389.022,07				

Batam, 30 Desember 2014

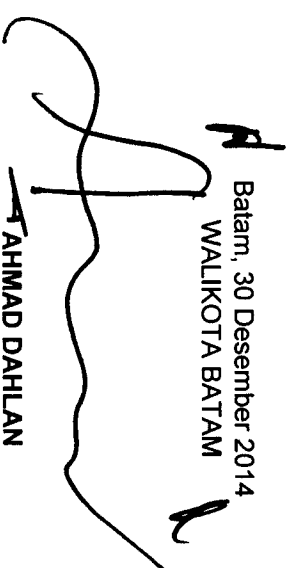
WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IX RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 7 Tahun 2014
 TANGGAL : 30 Desember 2014

NO	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	812,579,820,463.31	703,516,628,557.80	766,225,460,081.03	749,870,988,940.08
2	PERALATAN DAN MESIN	374,188,273,707.76	107,163,562,872.03	103,915,186,124.91	377,436,650,454.88
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	659,219,106,637.67	291,943,863,645.65	148,530,747,588.40	802,632,222,694.92
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	792,845,099,881.30	142,666,832,243.90	13,705,328,718.60	921,806,603,406.60
5	ASET TETAP LAINNYA	15,227,361,490.70	8,328,738,150.30	1,335,031,762.26	22,221,067,878.74
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	3,024,001,611.73	802,170,315.95	2,643,510,518.73	1,182,661,408.95
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	-	-	-	-
	J U M L A H	2,657,083,663,792.47	1,254,421,795,785.63	1,036,355,264,793.93	2,875,150,194,784.17


 Batam, 30 Desember 2014
 WALIKOTA BATAM
TAHMAD DAHLAN

LAMPIRAN X RANCANGAN PERATURAN DAERAH

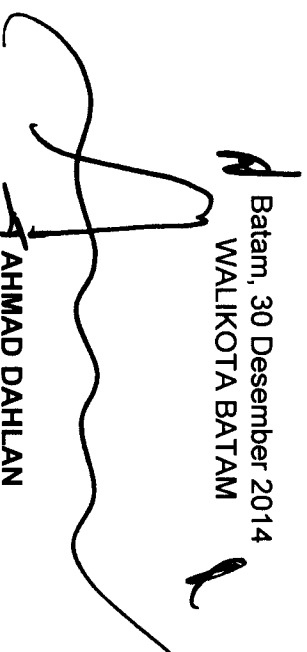
NOMOR : 7 Tahun 2014

TANGGAL : 30 Desember 2014

PEMERINTAH KOTA BATAM
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Aset yang tidak berwujud	8,570,888,373.28	7,234,260,800.00	534,335,000.00	15,270,814,173.28
2	Aset Lain-Lain	-	28,817,934,539.67	-	28,817,934,539.67
	J U M L A H	8,570,888,373.28	36,052,195,339.67	534,335,000.00	44,088,748,712.95

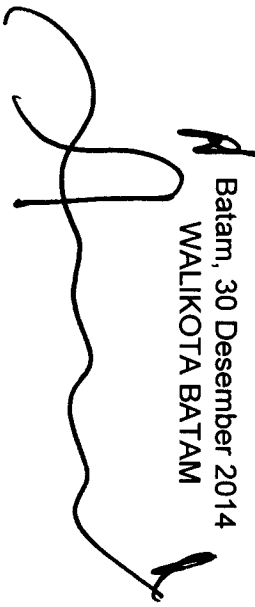
Batam, 30 Desember 2014
 WALIKOTA BATAM


 AHMAD DAHLAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KODE	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014		JUMLAH REALISASI S.D AKHIR TAHUN 2014	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) TAHUN 2015	
			APBD TAHUN 2014	PERUBAHAN APBD TAHUN 2014		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	JUMLAH						

Batam, 30 Desember 2014
 WALIKOTA BATAM

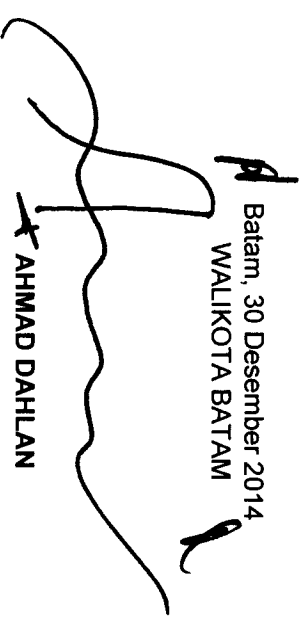


AHMAD DAHLAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN XII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 7 Tahun 2014
 TANGGAL : 30 Desember 2014

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH								


 Batam, 30 Desember 2014
 WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN XIII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

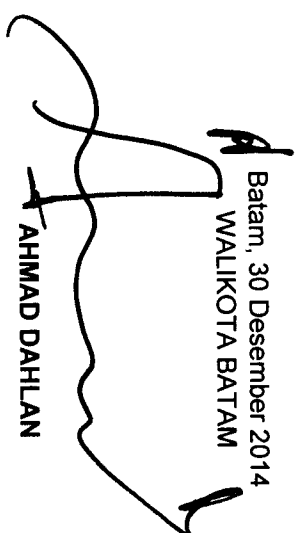
NOMOR : 7 Tahun 2014

TANGGAL : 30 Desember 2014

PEMERINTAH KOTA BATAM
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/ OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/ OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PRESENTASE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp)	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	JUMLAH										

0

Batam, 30 Desember 2014

 WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN